

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti.Bandung.
- _____, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cetakan ke-1, Kencana Prenadamedia Group, Grafindo Persada, Semarang.
- Asshiddiqie, Jimly, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Cetakan Kedua, Bhuana Ilmu Populer,Jakarta.
- _____, Muchamad Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang hukum*, cetakan pertama, Konstitusi Press, Jakarta Pusat.
- Atmasasmita, Romli, 2013, *Kapita Selekta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana (Buku I)*, Fikahati Aneska, Jakarta
- Ashofa, Burhan, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Danil, Elwi, 2021, *KORUPSI: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, PT. Raja Grafindo Persada. Depok.
- Husein, Yunus, 2008, *Negeri Sang Pencuci Uang*, Pustaka Juanda, Tigalima, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Jurdi, Fajlurrahman, 2017, *Logika Hukum*.Kencana, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 1999, Edisi ke: 1, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kenedi, John, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Hukum Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Laritmas, Selfianus dan Ahmad Rosidi, 2024, *Teori-Teori Negara Hukum*, Prenada Media, Jakarta,
- Mas, Marwan, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Moelong, Lexy, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Abadi, Bandung.

Mulyadi, Mahmud, 2008, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan.

Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum, Kencana Prenada*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Mochtar, Zainal Arifin dan Eddy O.S Hiariej. 2024, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Rajawali Press: Depok

R, Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, St, XIV, Intermasa, Jakarta.

Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Sjahdeini, Sutan Remy, 2004, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Suhartoyo, 2019, *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Metode Prioritas Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Rajawali Pers, Depok.

Suranata, Ferry Aries, 2010, *Peranan PPATK dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*, Gramata Publishing, Depok.

Sutedi, Adrian, 2008, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, dan Kepailitan*, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta.

Yanuar, Purwaning M, 2007, *Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Berdasar Konvensi PBB Anti Korupsi 2003*, Bandung.

Zen, A. Patra M, 2021, *Perlindungan Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik atas Harta Kekayaan dalam Perkara Pidana*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada Financial Action Task Force.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga Yang Beriktikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana atau yang selanjutnya disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003.

Penetapan Perkara Keberatan Nomor 02/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2022/PN.Jkt.Pst. tertanggal 7 September 2022 atas nama Shining Shipping S.A dan PT Hanochem Shipping.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor:4987 K/PID.SUS/2023 tanggal 12 Oktober 2023 *Jo.* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 11/Pid.Sus-TPK2023/PT.DKI tanggal 05 April 2023 *Jo.* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Nomor : 44/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 01 Desember 2022 atas nama Terdakwa Suyono

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

C. Skripsi, Tesis, Disertasi, Jurnal

Al Aziz, Farros, 2019, “Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga didalam penyitaan untuk memperoleh kembali barang miliknya terhadap harta yang bukan hasil tindak pidana”, *Skripsi*, Program Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Alfauzi, Ranga, 2016, “Penjatuhan Pidana Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana dan HAM” *Tesis*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Artadi, Ibnu, “Menggugat Efektivitas Penerapan Pidana Penjara Pendek”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 24, No. 4, 2006

Ayu Setyawati, Ida, “Beban Pembuktian Terbalik dalam Perkara Money Laundering dengan *Predicate crime* Tindak Pidana Korupsi”, *Brawijaya Law Student Journal*, 2014.

Denniagi, Erma, 2021, “Analisis Ke-Ekonomian Tentang Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang: Kajian Terhadap UU dan Putusan Pengadilan”, *Tesis*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Dwiananto, Ignatius Hernindio, 2020, “Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Tesis*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Evander, “Keberatan Pihak Ketiga Yang Beriktikad Baik Terhadap Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurist-Diction Law Journal*, Vol. 7, No.1, 2024,

Hidayat, Ahmad Arif, 2023, “Perbandingan Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Beberapa Negara” *Tesis*, Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan.

- Muhlashin, Ias. “Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 8, No. 1, 2021.
- Juni Malsela S, Ari 2022, “Kompetensi Absolut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mengadili Perkara Keberatan Pihak Ketiga Terhadap Putusan Mengenai Perampasan Aset”, *Skripsi*, Program Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Marlina, Andi, Imron R, dan Safri S, “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Jasa Umrah Abu Tours”, *Delictum: Jurnal Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*, 2023.
- Martono, Sigit, 2015, “Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik Sehubungan dengan Penyitaan dan Perampasan Aset dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No.39/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST)”, *Skripsi*, Universitas Indonesia, Depok.
- Muladi, Agus, 2016, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus No. 48/Pid.Sus/2013/PN. Mks)”, *Skripsi*, Universitas Hasanudin, Sulawesi Selatan.
- Nugroho, Lucky Dafira, “Itikad baik sebagai tolak ukur perbuatan debitor dalam kepailitan”, *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.14, No. 2, 2016.
- Pahlevi, Farida “Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen”, *Jurnal El-Dusturie*, Vol.1, No. 1,2022.
- Pratama, Ronaldo Galang, 2023, “Implementasi Perampasan Harta Hasil Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara (Studi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Barat)”, *Skripsi*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Prayoga, Yoandre, 2022, “Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan MA Nomor 1454 K/Pid.Sus/2011 dan Putusan MA Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018)”, *Skripsi*, Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan.
- Priyono, Ery Agus, “Peranan asas itikad baik dalam kontrak baku (upaya menjaga keseimbangan bagi para pihak)”, *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2017.

- Puspapertiwi, Sheiffi. “Rasionalitas Indonesia dalam Pengimplementasian “40+ 9 Rekomendasi” FATF.” *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol 5, No. 1, 2016.
- Putri, Fidi Adhani, 2023, “Perampasan Aset Pihak Ketiga Yang Beriktikad Baik Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Rahman, 2017, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang yang Tidak Mewajibkan Pembuktian Terlebih Dahulu Terhadap Tindak Pidana Asal”, *Tesis*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Rais, Andi Nurfitriana, 2023, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Yang Beriktikad Baik Atas Barang Rampasan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Skripsi*, Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan.
- Saing, Salomo, “Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Majelis Hakim Dalam Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Studi Di Pengadilan Negeri Singkawang”, *Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN*, Vol. 3 No. 5, 2015
- Saputra, Refki, “Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia”, *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 3, No.1, 2017.
- Selviria, Isma Nurillah, “Hak Konstitusional Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Dalam Non Convention Based Asset Forfeiture”, *Simbur Cahaya*, Vol. 27, No. 2, 2021.
- Sosiawan, Ulang Mangun. “Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.20, No.4, 2020.
- Supena, Cecep Cahya, “Tinjauan Tentang Konsep Negara Hukum Indonesia Pada Masa Sebelum Dan Sesudah Amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 9, No. 2, 2023.

Syarif, Laode M, “Melawan Stigma Penegak Hukum Selalu Tertinggal”, *Jurnal Integritas*, Vol. 4, No. 2, 2018.

Syawarni, 2020, “Kemampuan Rezim Anti Pencucian Uang Dalam Merespons Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi”, *Skripsi*, Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Tan, David, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8, No. 8, 2021.

Tumalun, Hillary G, “Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Modal Ventura Berdasarkan Pasal 1338 Ayat 3 KUHperdata dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009”, *Lex Privatum*, Vol. 6, No.10, 2018.

Williams Roeroe, Samuel “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Lembaga Keuangan”, *Lex Administratum*, Vol.10, No. 5, 2022.

Wardhana, Rangganata Adhi Kusuma dan R.B. Sularto, “Studi Komparasi Formulasi Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia-Malaysia”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4 No. 2, 2022.

Yunanto, “Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7 No. 2, 2019.

D. Internet

Anjarsari, lulu, 2021, “MK Peluas Definisi Penyidik Tindak Pidana Asal dalam UU TPPU”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17380&menu=2>

Arfana, Nano Tresna, 2019. “Ahli: Pasal 74 UU TPPU dan Penjelasannya Saling Bertentangan”, <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14962&menu=2>

Doly, Denico, 2023, “Penanggulangan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretaris Jenderal DPR RI, https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan--II-PUSLIT-April-2023-208.pdf

Einizar, Normand Edwin, “Mencari Keadilan atas Harta Pihak Ketiga yang Disita dalam Perkara Pidana”,

<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt60af4a81b1b2f/mencari-keadilan-atas-harta-pihak-ketiga-yang-disita-dalam-perkara-pidana#!>

_____, 2020, Iktikad Baik dalam Hukum Administrasi Negara”
<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt5fd8caafc9f5f/iktikad-baik-dalam-hukum-administrasi-negara/>

FATF, “The FATF Recommendations”, <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html>

Kasiyanto, Safari, “Tinjauan Masa Depan Dalam Hukum”, Kompas.id
<https://www.kompas.id/baca/opini/2022/06/23/tinjauan-masa-depan-dalam-hukum>,

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPTK), Kajian Hukum: Permasalahan Hukum seputar Perampasan Aset dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan upaya Pengoptimalisasiannya, https://jdih.ppatk.go.id/storage/dokumen_produk_hukum/5.%20Kajian%20Hukum%20Perampasan%20Aset.pdf

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPTK), “Siaran Pers: Indonesia Selangkah Lebih Dekat Menjadi Anggota Financial Action Task Force”
https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1257/siaran-pers-indonesia-selangkah-lebih-dekat-menjadi-anggota-financial-action-task-force.html

Persatuan Jaksa Indonesia, “Nikmati Uang Korupsi Asabri, Heru Hidayat Dituntut Mati Oleh Jaksa”, <https://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/1983>,

Qurani, Hamalatur, “Konsep dan Penafsiran Iktikad Baik dalam Hukum Perdata”,
<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt5fbbb51ab686f/konsep-dan-penafsiran-iktikad-baik-dalam-hukum-perdata/>

Susetyo, Heru, 2022, Viktimisasi Terhadap Pihak Ketiga Beriktikad Baik dalam Perampasan Aset Tipikor, Berita Fakultas Hukum Universitas Indonesia, <https://law.ui.ac.id/viktimisasi-terhadap-pihak-ketiga-beriktikad-baik-dalam-perampasan-aset-tipikor-oleh-heru-susetyo-s-h-l-l-m-m-si-ph-d/>

Safari Kasiyanto, 2022, “Tinjauan Masa Depan Dalam Hukum”,
[https://www.kompas.id/baca/opini/2022/06/23/tinjauan-masa-de-](https://www.kompas.id/baca/opini/2022/06/23/tinjauan-masa-depan-dalam-hukum)

[pan-dalam-hukum](https://www.kompas.id/baca/opini/2022/06/23/tinjauan-masa-depan-dalam-hukum)

Wibowo, Widyanti “Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”, Jurist-Diction Vol. 2 No. 5, 2019

Yasin, Muhammad, “Mengisi Kekosongan Hukum Pasal 19 UU Pemberantasan Tipikor”, [https://www.hukumonline.com/stories/article/lt6059b40bde366/mengisi-kekosongan-hukum-pasal-19-uu](https://www.hukumonline.com/stories/article/lt6059b40bde366/mengisi-kekosongan-hukum-pasal-19-uu-pemberantasan-tipikor?PHPSESID=653463caa40d13e48965870664f5cdab)
[pemberantasan-tipikor?PHPSE](https://www.hukumonline.com/stories/article/lt6059b40bde366/mengisi-kekosongan-hukum-pasal-19-uu-pemberantasan-tipikor?PHPSESID=653463caa40d13e48965870664f5cdab)
[SID=653463caa40d13e48965870664f5cdab](https://www.hukumonline.com/stories/article/lt6059b40bde366/mengisi-kekosongan-hukum-pasal-19-uu-pemberantasan-tipikor?PHPSESID=653463caa40d13e48965870664f5cdab)